



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA KERJA TAHUNAN

**Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia**

Provinsi Kepulauan Riau

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSDM Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 selesai disusun. RKT ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPSDM selama kurun waktu setahun sesuai renstra.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, target dan pendanaan indikatif, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang berpedoman kepada Renstra BPSDM Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman BPSDM untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pengembangan Sumberdaya manusia yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerja dalam melayani. BPSDM dihadapkan pada target yang harus dicapai dan tentunya perlu dukungan dari semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat baik dari BPSDM maupun lembaga lainnya yang mengelola pelatihan agar BPSDM dapat menjalankan strategi dan kebijakannya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Tidak dapat dipungkiri masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penyusunan dokumen ini, yang pastinya menjadi bahan masukan yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Demikian dokumen ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai penjabaran dari Renstra 2025-2029, disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, yang menjabarkan setiap sasaran strategis ke dalam kegiatan-kegiatan yang harus dicapai dalam tahun 2026, dilengkapi dengan indikator untuk menilai capaian tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini telah melalui proses yang melibatkan seluruh pegawai baik pimpinan maupun staff pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 juga telah disesuaikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini menjadi bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal, dan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi organisasi sekaligus merupakan awal dari upaya pencapaian Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau secara optimal.

Diharapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



ANY LINDAWATY, S.H., M.H.

NIP197210051998032014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DATA UMUM ORGANISASI	1
B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENCANA STRATEGIS	4
C. KETERKAITAN RKT DENGAN ANGGARAN.....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	8
A. TUJUAN DAN SASARAN BPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	8
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	8
C. INDIKATOR KINERJA.....	8
BAB III RENCANA KINERJA	10
A. TARGET KINERJA.....	10
B. RINCIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026.....	11
BAB IV PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran BPSDM Kepulauan Riau Tahun 2026.....	5
Tabel 2. 1 Indikator-indikator kinerja utama BPSDM Kepulauan Riau.....	9
Tabel 3. 1 Target kinerja sasaran program tahun 2026	10
Tabel 3. 2 Indikator dan target kinerja	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau..... 3

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan ke-5 dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kepulauan Riau periode 2025 - 2029. Sebagai dokumen perencanaan dari suatu organisasi pendukung, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, selain mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau juga harus mengacu kepada program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini terdiri atas empat bab, yaitu bab pendahuluan, ringkasan Renstra, dan rencana kinerja dari setiap sasaran, kegiatan, dan target tahun 2026, serta bab penutup. Selain itu, diungkapkan juga strategi untuk mencapai setiap sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan.

Berikut ini diuraikan data umum organisasi, keterkaitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Renstra dan anggaran.

A. DATA UMUM ORGANISASI

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

"membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi."

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

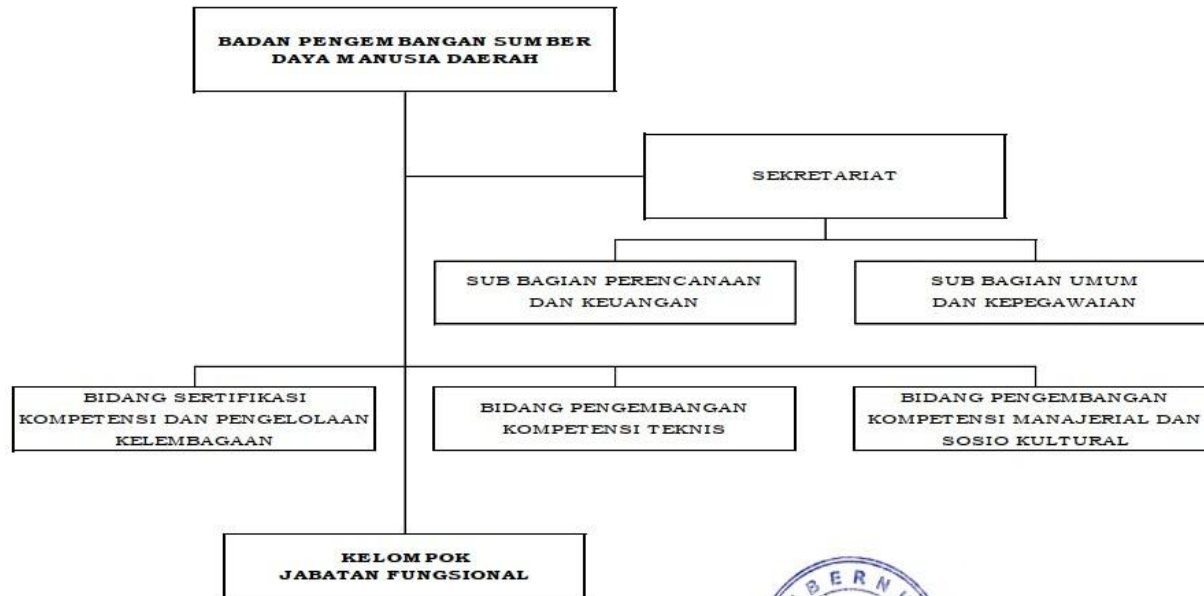
1. Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan

Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural;
5. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI |
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH TIPE B
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023




GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ANSAR AHMAD

Gambar 1.1 Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENCANA STRATEGIS

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selain mengacu kepada tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, juga mengacu kepada visi, misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, dan melibatkan unsur internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau serta memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra menjadi dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sekaligus kerangka untuk menyusun Rencana Kinerja (RKT) dan anggaran tahunan. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 maka seluruh Program Kegiatan yang tertuang dalam Renstra di tahun 2026 disesuaikan. Penyesuaian Program Kegiatan ke dalam Urusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di petakan sehingga seluruh Rencana Kerja Tahunan (RKT) di Tahun 2026 dapat dijalankan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja, dan pagu definitif untuk tahun anggaran yang sedang disusun. Untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai, diuraikan pula sumber daya, yaitu sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana serta prasarana yang diperlukan.

C. KETERKAITAN RKT DENGAN ANGGARAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dalam mengusulkan program kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan rencana kinerja tahunan pada tahun yang bersangkutan (sistem anggaran berbasis program), sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Penetapan anggaran dalam RKT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2026 dalam proses perencanaan dan penganggarannya dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow progame*) melalui penganggaran berbasis kinerja ke dalam kegiatan utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau melalui RKA tahun 2026 sebesar Rp. 14.362.009.626,-. Berdasarkan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Anggaran BPSDM Kepulauan Riau Tahun 2026

NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			14.362.009.626
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		11.173.715.045,87
I		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.888.213,90
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.338.601,00
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.491.497,90
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.058.115,00
II		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.595.000,00
4		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.595.000,00
III		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.875.009.625,97
5		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.608.201.625,97
6		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.808.000,00
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.636.429,00

7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.708.400,00
8		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.238.000,00
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.703.619,00
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.634.000,00
11		Fasilitas Kunjungan Tamu	4.058.900,00
12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.293.510,00
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.739.221,00
13		Pengadaan Mebel	84.816.120,00
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.923.101,00
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.373.716,00
15		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.050.000,00
16		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.330.000,00
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.993.716,00
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.472.840,00
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.574.560,00
19		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.791.400,00
20		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.106.880,00

B	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		3.188.294.580,13
VIII		Pengembangan Kompetensi Teknis	243.506.541,00
21		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	243.506.541,00
IX		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.944.788.039,13
22		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota	184.767.240,00
23		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	142.807.540,00
24		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.617.213.259,13

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. TUJUAN DAN SASARAN BPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029, yaitu:

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas dan Kinerja ASN

Indikator Tujuan :

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Sasaran :

Meningkatnya Pengetahuan,Keahlian dan Keterampilan ASN

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. Penguatan tata kelola pengembangan SDM
2. Peningkatan Pengembangan kompetensi terintegrasi melalui metode Corporate University (Corpu).

C. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja ditetapkan agar kinerja BPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diukur capaiannya. Indikator kinerja dalam Renstra harus memenuhi kriteria/karakteristik kualitatif yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Indikator-indikator kinerja utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau untuk masing-masing sasaran program adalah :

Tabel 2. 1 Indikator-indikator kinerja utama BPSDM Kepulauan Riau

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	29,39

BAB III RENCANA KINERJA

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026, sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat program merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan strategis dan visinya, sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam rangka mencapai sasaran.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan tercermin pada indikator setiap kegiatan, sehingga apabila indikator kegiatan telah berhasil dicapai, diharapkan tujuan telah dapat dicapai. Indikator untuk mengukur kinerja kegiatan meliputi *input*, *output*, dan *outcome*. Indikator *input* berupa dana yang tersedia. Berdasarkan jumlah pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau yang diperkirakan aktif tahun 2025 sebanyak 45 orang. Sementara itu, untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tersedia anggaran dalam DPA Tahun 2026 sebesar Rp. 14.362.009.626,-

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2026 menetapkan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tabel 3. 1 Target kinerja sasaran program tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	40,72
2.		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	49,57

3.		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	23,75
4.		Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	37,82

B. RINCIAN KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026

Indikator dan target kinerja *input dan output* masing-masing kegiatan dan subkegiatan adalah:

Tabel 3.2 Indikator dan target kinerja

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Waktu	Dana (Rp)	Output
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		14.362.009.626.00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		11.173.715.045,87	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		207.888.213,90	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	104.338.601.00	1 Dok
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	53.491.497.90	2 Lap
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	50.058.115.00	2 Lap
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		46.705.088	100
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	71.595.000.00	1 Paket

III	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		264.131.400	45 Orang/Bulan
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	9.608.201.625,97	45 Orang
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	266.808.000,00	4 Dok
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	177.636.429,00	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2.708.400,00	1 Paket
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	22.238.000,00	1 Paket
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	40.703.619,00	1 Paket
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	2.634.000,00	1 Paket
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	4.058.900,00	4 Laporan
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	105.293.510,00	4 laporan
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		171.739.221,00	100%
12	Pengadaan Mebel	12 Bulan	84.816.120,00	4 Paket
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	86.923.101,00	5 Unit
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	386.373.716,00	100%

14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	41.050.000,00	4 Laporan
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	53.330.000,00	4 Laporan
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	291.993.716,00	4 Laporan
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		283.472.840,00	100%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	262.574.560,00	5 Unit
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	9.791.400,00	50 Unit
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	11.106.880,00	1 Unit
B	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		544.795.485	
VIII	Pengembangan Kompetensi Teknis		243.506.541,00	4525 Orang

20	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12 Bulan	243.506.541,00	4525 Orang
IX	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2.944.788.039,13	4 Dok

21	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	12 Bulan	184.767.240,00	40 Orang
22	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	12 Bulan	142.807.540,00	1 Laporan
23	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Bulan	2.617.213.259,13	7160 Orang

BAB IV PENUTUP

Tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau telah di jebarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat *riil*, disertai dengan ukuran kinerja yang lebih terukur, diharapkan target sasaran kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang diuraikan di depan dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun, dalam pelaksanaan rencana tersebut, membutuhkan banyak kerja sama dan koordinasi yang baik dengan unit kerja lainnya, agar hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan dan meningkatkan kinerja. Meskipun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 ini merupakan sebuah bentuk komitmen segenap personil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuan pelaksanaan kinerja dan pencapaian akuntabilitas keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan/ revisi rencana, jika ditemui hal-hal yang memerlukan perbaikan/koreksi atas rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini akan dipantau secara terus menerus dan dievaluasi secara berkala, agar jika terdapat perubahan tersebut dapat segera direspon.

Diharapkan dokumen ini akan senantiasa dijadikan sebagai acuan oleh segenap personil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan akuntabel. Tidak ada suatu perencanaan yang akurat dan sempurna, oleh karena itu selama diharapkan masukan dari berbagai pihak guna dilakukan perbaikan dan peningkatan ke depan.